

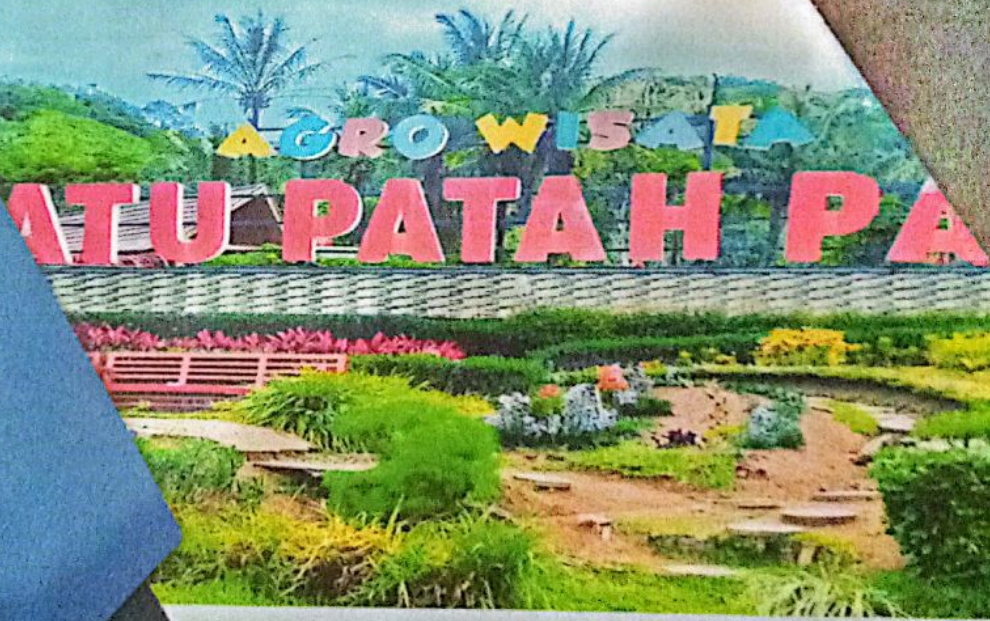


2024

RENJA

DINAS PERTANIAN

RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN
TAHUN 2024



DINAS PERTANIAN
KOTA SOLOK

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA SOLOK TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kota Solok dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Kota Solok	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN	35
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan RPJMD.....	40
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	42
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	44
4.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	44
4.2 Program dan Kegiatan GAP.....	44
4.3 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	49
BAB V. PENUTUP	60

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2024 Dinas Pertanian Kota Solok dapat di selesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Dinas Pertanian mempunyai fungsi penting dalam sistem Perencanaan Daerah, karena Rencana Kerja menterjemahkan Rencana Strategis Jangka Menengah (RPJM dan Renstra PD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis kedalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Rencana Kerja Dinas Pertanian juga dapat digunakan untuk mengetahui kinerja Dinas Pertanian tahun sebelumnya dalam melaksanakan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hasil evaluasi renja tahun berjalan yang merupakan tolak ukur sejauh mana keberhasilan Dinas Pertanian dalam mencapai tujuannya.

Semoga Rencana Kerja Perangkat Dinas Pertanian Tahun 2024 dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam operasional Dinas Pertanian Kota Solok.

Solok, November 2023

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KOTA SOLOK**



H. ZULKIFLI, SP

NIP. 19660805 200604 1 003



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah telah dilakukan verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diselaraskan dengan Peraturan Wali Kota Solok Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan rencana kerja perangkat daerah lainnya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 3);



8. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah.

Pasal 3

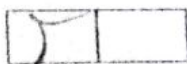
- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika yang terdiri dari:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu;
 - c. bab III memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah;
 - d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. bab V memuat penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rencana Kerja Sekretariat Daerah;



- b. rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. rencana Kerja Inspektorat Daerah;
 - d. rencana Kerja Dinas Daerah, terdiri dari :
 - 1. Dinas Pendidikan;
 - 2. Dinas Kesehatan;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - 4. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
 - 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - 7. Dinas Sosial;
 - 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 9. Dinas Pangan;
 - 10. Dinas Lingkungan Hidup;
 - 11. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - 12. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 - 13. Dinas Perhubungan;
 - 14. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 - 15. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 16. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 18. Dinas Pariwisata;
 - 19. Dinas Pertanian; dan
 - 20. Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
 - e. rencana Kerja Badan Daerah
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2. Badan Keuangan Daerah;
 - 3. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - 5. Badan Penelitian Dan Pengembangan.
 - f. rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
 - g. rencana Kerja Kecamatan
 - 1. Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
 - 2. Kecamatan Tanjung Harapan.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.



- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Apabila dalam pelaksanaan RKPD mengalami perubahan, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 14 november 2023

WALIKOTA SOLOK,



ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok

pada tanggal 14 november 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,



SYAIFUL. A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk perencanaan jangka panjang sudah ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 2005-2025, dan untuk jangka menengah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan jangka pendek adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sejalan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa dalam menetapkan RKPD diawali dengan penyusunan rancangan awal RKPD. Untuk dapat mengajukan Rancangan Awal RKPD, setiap perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun dan memiliki Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang akan disempurnakan dan diverifikasi oleh BAPPEDA untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Rancangan Awal RKPD.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana didahului dengan penyusunan kebijakan umum APBD yang ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Selanjutnya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dimulai dengan tahapan persiapan penyusunan, yang meliputi pembentukan tim penyusunan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, serta penyiapan data dan informasi, selanjutnya dilakukan tahap penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan

penetapan. Berdasarkan dengan ketentuan ketentuan tersebut, untuk penyusunan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024, Dinas Pertanian Kota Solok perlu terlebih dahulu untuk menyusun Rancangan Awal Renja Dinas Pertanian Kota Solok Tahun 2024 sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Solok

Untuk dapat mengetahui kinerja Dinas Pertanian dalam melaksanakan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Rencana Kerja merupakan tolok ukur sejauh mana keberhasilan Dinas dapat ditentukan.

1.2 Landasan Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
- 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 3 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- 5 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- 7 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 01);
- 8 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2021-2026;
- 9 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- 10 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Solok adalah memberikan arahan dan petunjuk tentang pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pertanian Kota Solok Tahun 2024, agar pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien, terpadu, terstruktur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Solok Tahun 2021-2026.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renja Dinas Pertanian Kota Solok Tahun 2024 adalah :

1. Mendiskripsikan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Solok pada tahun 2024.
2. Menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Pertanian Kota Solok pada tahun 2024 dalam pencapaian target tujuan sasaran/program dan indikator kinerja kegiatan
3. Memantapkan akuntabilitas kinerja melalui pengukuran kinerja Dinas Pertanian Kota Solok sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan daerah dibidangan pertanian dan perikanan.
4. Menjadi dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian Kota Solok.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kota Solok Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Peraturan Walikota Solok tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 diLingkungan Pemerintah Kota Solok

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja

Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/ Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, kewenangan Perangkat Daerah, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2023), mengacu pada APBD Tahun Berjalan (2023). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan

Pokok-pokok materi yang disajikan :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan PD;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan hasil informasi PD Propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan RPJMD

Telaahan terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PERTANIAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan :
 - Pencapaian visi dan misi kepala daerah
 - Pencapaian SDGs
 - Pengentasan kemiskinan
 - Pencapaian SPM
 - Pendayagunaan potensi daerah
- b. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Gender Analysis Pathway (GAP)
- c. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi :
 - Jumlah program, jumlah kegiatan dan Jumlah Sub Kegiatan
 - Sifat Penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apasaja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu
 - Total kebutuhan dana pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaanya

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Kota Solok

Pada tahun 2022, Dinas Pertanian Kota Solok melaksanakan 9 program dan 21 kegiatan dan 40 sub kegiatan yang terdiri dari non urusan dan urusan. Secara umum Dinas Pertanian Kota Solok telah dapat melaksanakan program dan kegiatan belanja langsung sesuai dengan yang direncanakan. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun 2022 dan pencapaian renstra sampai Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

SOLLOK

OPD DINAS PERTANIAN

Abstract

Berdasarkan Tabel 2.1 bahwa Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022

A. Evaluasi Renja Tahun 2022

Pada tahun 2022 adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018. Hasil evaluasi program dan kegiatan yang terdiri dari 9 program dan 21 kegiatan dengan 40 sub kegiatan, realisasi pencapaian fisik kegiatan sebesar 105,52 % sedangkan keuangan sebesar 90,33% Pada Dinas Pertanian terdapat 2 (dua) program prioritas, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Prioritas I

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 7 kegiatan dan 17 sub kegiatan. Pelaksanaan program ini tidak menemukan kendala yang berarti, capaian kinerja sebesar 98,1% secara fisik dan keuangan 92,9 %. Kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin sebagai penunjang pencapaian kinerja pelayanan.

Prioritas II

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, terdiri dari 2 kegiatan dengan 4 sub kegiatan. Kegiatan pada program ini merupakan kegiatan pengelolaan perikanan budidaya yang terdiri dari penunjang operasional teknis pada UPTD BBI, penyediaan prasarana pembudidaya ikan dan pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan. Capaian kinerja program ini secara fisik sebesar 100% dan keuangan 88,85%. Hal ini disebabkan karena pencapaian kinerja rata mencapai target.
2. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan. Program ini secara fisik terealisasi 100% dan keuangan 98,99%.
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Kegiatan pada program ini merupakan kegiatan penunjang pemasaran perikanan berupa keikutsertaan pada kegiatan lomba masak ikan tingkat nasional. Program ini secara fisik terealisasi 100 dan keuangan 98%, Pelaksanaan program ini tidak mengalami kendala yang berarti.
4. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, terdiri dari 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan capaian kinerja secara fisik sebesar 105,4% dan keuangan sebesar 71,6% . Kegiatan pada program ini terdiri dari:

- a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, terdiri dari 1 sub kegiatan
 - b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kab/Kota, dengan 3 sub kegiatan, yaitu Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman, Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman dan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman secara keseluruhan terealisasi sesuai target.
 - c. Kegiatan Penyediaan Benih Bibit Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Lain, dengan 1 sub kegiatan. Secara fisik capaian melebihi target yaitu 100, namun untuk keuangan hanya mencapai 48,3%, karena kegiatan pengadaan bantuan ayam tidak terealisasi. Hal ini disebabkan oleh kelompok penerima belum memenuhi persyaratan administrasi kelompok sesuai ketentuan.
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Pelaksanaan program terlaksana secara baik, capaian kinerja sebesar 100% sedangkan keuangan terealisasi sebesar 94,2%.
 6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari 4 kegiatan dengan masing-masing 1 sub kegiatan. Kegiatan pada Program ini berupa kegiatan penunjang pada UPTD Puskesmas dan UPT RPH, Pemeriksaan Ternak Qurban, dan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis. Program ini secara fisik terealisasi 100%, keuangan 87 %. Jika dievaluasi dari semua kegiatan terealisasi bahkan melebihi target. Namun untuk kegiatan pada UPTD RPH khususnya pemotongan ternak tidak mencapai target. Hal ini karena ada Kasus PMK dan penurunan jumlah pemotongan.
 7. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Program ini berjalan optimal dengan capaian kinerja secara fisik sebesar 100% dan keuangan 92,63%. Kegiatan pada Program ini berupa kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian Kab/Kota.
 8. Program Penyuluhan Pertanian terdiri dari 1 kegiatan dengan 4 sub kegiatan,
Capaian kinerja secara fisik sebesar 125% dan keuangan sebesar 83,5%. Capaian secara fisik melebihi 100%, karena capaian indikator melebihi target.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Berdasarkan indikator kinerja pada Renstra Dinas Pertanian, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kota Solok dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel. 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah benih berkualitas yang digunakan (ekor)			550.000	570.000	590.000	600.000	620.000	550.000	579.700	1.020.500	570.000	590.000	
2	Jumlah produksi perikanan (ton)			154	156	158	159	161	154	156	154,2	156	158	
3	Luas Perairan umum yang diawasi (Ha)			2,8	2,9	2,10	2,11	2,12	2,8	3,48	2,8	2,9		
4	Persentase pelaku agribisnis perikanan yang dibina (%)			100	100	100	100	100	00	75	100	100	100	
5	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/kap/th)			37,12	38,0	39,5	41,8	42,16	35,26	36,22	38,33	38,0	39,5	
6	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase pemenuhan sarana pertanian			70	75	80	85	90	70	70,95	100	75	80	
8	Persentase peningkatan populasi ternak:													
	- Sapi (%)			4,97	4,98	4,99	5,00	5,04	8,85	4,34	4,97	4,98	4,99	
	- Unggas (%)			4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	21,06	4,77	4,99	4,95	4,95	
	- Kambing (%)			4,99	5,00	5,00	5,00	5,00	12,99	4,71	4,95	5,00	5	
9	Persentase pemakaian benih bersertifikat:													

	- Padi (%)		25	30	35	40	45	20	20,1	25	30	35
	- Serai wangi (%)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Kopi (%)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (unggulan)											
	- Padi (%)		0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,20	0,2	0,76	0,24	0,26
	- Serai wangi (%)		3	3	3	3	3	3	3,33	8,6	3	29
	- Kopi (%)		2	4	5	6	7	1	4,34	8,3	4	5
11	Persentase ketersediaan prasarana pertanian		80	83	85	86	87	75	100	100	83	83
12	Persentase pengendalian Penyakit Hewan menular		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase kesembuhan penyakit hewan		94	95	95	96	97	92	97,22	100	95	95
14	Persentase penurunan laas serangan OPT		100	100	100	100	100	100	70,95	100	100	100

Untuk pencapaian kinerja pada Tahun 2022, diukur berdasarkan Renstra 2016 -2021 dan Renstra Dinas Pertanian Kota Solok Tahun 2021 – 2026 :

a. Peningkatan Produktifitas Perikanan

Capaian target kinerja peningkatan produktifitas perikanan sudah mencapai target, sebagai berikut :

- o Jumlah Benih berkualitas yang digunakan, terealisasi melebihi target, dari 550.000 ekor ditargetkan pada tahun 2022, terealisasi sebanyak 1.020.500, yaitu 185,55%. Hal ini didukung oleh adanya Kelompok Pembudidaya Ikan yang melaksanakan budidaya.
- o Jumlah produksi perikanan dapat melebihi target awal yang direncanakan, dari 154 ton target jumlah produksi perikanan dapat dipenuhi sebanyak 154,2 ton, dengan realisasi 100,1% hal ini didukung dengan adanya pembinaan pada Pokdakan serta adanya kegiatan pemantauan pengendalian penyakit ikan. Pembinaan dilakukan terutama bagi kelompok yang menerima bantuan pada tahun-tahun sebelumnya untuk menggulirkan kembali kegiatan budidaya setelah panen. Disamping adanya Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang telah terbentuk dan telah melaksanakan kegiatan budidaya sebelumnya, pencapaian target juga didukung oleh adanya aktifitas budidaya perikanan yang baru tumbuh dan menggeliat untuk mendukung perekonomian masyarakat terutama jenis ikan lele dan nila dimana penyerapan pemasarannya untuk rumah makan dan pusat kuliner yang menyediakan menu ikan disamping juga untuk pengolahan ikan asap/salai dalam maupun diluar daerah Kota Solok.
- o Luas perairan umum yang diawasi, dari 2,8 Ha terealisasi sepenuhnya 100%.
- o Persentase pelaku agribisnis perikanan yang dibina juga terealisasi 100%
- o Tingkat konsumsi ikan dari 37, 12 Kg/Kap/Th ditargetkan, terealisasi 38,33 Kg/Kap/Th yaitu 103,26 %. Hal tak lepas dari kegiatan pendukung yaitu kegiatan Gemarikan dan pengenalan aneka olahan ikan sejak dini pada PAUD se Kota Solok, sehingga target tingkat konsumsi ikan tercapai dengan baik.

b. Peningkatan Produktifitas Peternakan

Perkembangan populasi ternak Tahun 2021 dan 2022 yang mengalami perkembangan yang sangat baik. Untuk capaian kinerja Tahun 2022, populasi ternak sapi dapat dicapai sebesar 105,45 % dari target yang ditetapkan sebesar

4,97 % dengan populasi ternak sapi sebanyak 2.754 ekor. Sementara untuk populasi ternak kambing juga mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022. Untuk capaian kinerja Tahun 2022, populasi ternak kambing dapat dicapai sebesar 107,21 % dari target yang ditetapkan sebesar 4,99 % dengan populasi ternak kambing sebanyak 2.421 ekor. Sedangkan peningkatan yang lebih besar dapat dilihat pada populasi unggas kota solok. Dimana capaian kinerja Tahun 2022, populasi ternak unggas dapat dicapai sebesar 133,3 % dari target yang ditetapkan sebesar 4,95 % dengan populasi ternak unggas sebanyak 469.861 ekor.

Peningkatan populasi ternak sapi didukung dengan adanya pelayanan Inseminasi Buatan (IB), yang juga selain melalui dana APBD Kota Solok juga didukung melalui kegiatan SIKOMANDAN dengan anggaran dari APBD Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk ternak unggas juga didukung melalui kegiatan Nagari Beternak pada APBD Provinsi Sumatera Barat, dengan memberikan bantuan ternak unggas kepada peternak.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun 2022 penyaluran bantuan bantuan untuk peternak terus dilakukan baik dari APBD Kota Solok maupun dari APBD Provinsi dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi akibat covid 19 pada tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini. Pembinaan terhadap kelompok-kelompok yang menerima bantuan maupun yang melakukan usaha peternakan secara mandiri terus dilakukan melalui tenaga pendamping kegiatan dan penyuluh pertanian, dengan pendampingan dan motivasi dari petugas dari dinas pertanian membuka wawasan dan meningkatkan keterampilan peternak dalam menjalankan usahanya.

Sementara untuk persentase pengendalian penyakit hewan dan tingkat kesembuhan penyakit hewan juga realisasi sepenuhnya 100% dari target. Hal ini tidak lepas dari sinergi program APBD Kota Solok dengan APBD Provinsi Sumatera Barat. Dimana dengan adanya wabah PMK, capaian kinerja ini tetap terealisasi.

c. Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan

Perkembangan produktifitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dari tahun 2021 ke tahun 2022 serta tingkat pencapaian kinerja tahun 2022. Dari hasil pencapaian indikator kinerja sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- Untuk komoditi tanaman pangan terutama padi, dibandingkan dengan tahun 2021 produksi tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 0,76 % dari

yang ditargetkan sebesar 0,22 %. Kondisi ini menggambarkan secara umum jumlah panen padi di Kota Solok mengalami kenaikan meskipun secara jumlah masih kecil. Ini dapat dicapai karena adanya peningkatan kemampuan petani kota solok dalam menerapkan teknologi pertanian tepat guna terutama pemakaian benih unggul dan pelaksanaan sistem tanam jajar legowo. Selain itu melalui tenaga penyuluh dan petugas teknis di lapangan, dinas pertanian secara kontinu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para petani untuk melakukan teknologi pertanian yang disarankan sehingga dapat memicu peningkatan jumlah panen padi.

- Capaian kinerja untuk produksi hortikultura mengalami peningkatan yang cukup baik dimana produksi cabe pada tahun 2022 mencapai 124 ton dari 105 ton yang ditargetkan dengan capaian kinerja mencapai 118,09 %. capaian yang cukup baik ini disebabkan oleh petani kota solok sudah mulai tertarik dan termotivasi untuk membudidayakan cabe baik sebagai tanaman inti diareal perkebunan maupun sebagai penyelang antar waktu dengan tanaman padi diareal persawahan. Hal ini tidak terlepas dari pembinaan, motivasi dan pendampingan yang dilakukan oleh dinas pertanian di lapangan. Namun demikian untuk dapat terus meningkatkan produksi cabe di Kota Solok masih diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak untuk tahun-tahun berikutnya.
- Untuk produksi komuni di perkebunan serai wangi dan kopi tahun 2022 juga mengalami kenaikan terutama komuni kopi dimana dari peningkatan produksi sebesar 2 % yang ditargetkan, dapat teralisasi sebesar 8,33 % dengan produksi sebanyak 13 ton sehingga capaian kinerja tercapai sebesar 416,5 %. Pencapaian ini disebabkan karena adanya rehabilitasi tanaman kopi dari yang sudah tua dengan varietas yang baru baik dari jenis kopi robusta maupun dari jenis arabika sehingga meningkatkan angka produktifitas dari tanaman kopi tersebut.

Untuk komuni tanaman serai wangi pada tahun 2022 ini juga mengalami peningkatan produksi sebesar 8,60 % dari yang ditargetkan sebesar 3,00 % dengan produksi sebesar 95 ton pada tahun 2022 atau mengalami kenaikan produksi sebesar 2 ton dari tahun 2021 yang hanya sebesar 93 ton. Peningkatan produksi tanaman serai wangi ini tidak terlepas dari pendampingan dan pembinaan yang dilakukan dinas pertanian terhadap kelompok kelompok tani pengembang serai wangi baik melalui dukungan anggaran APBD maupun secara swadaya petani atsiri yang tetap melakukan pemeliharaan terhadap tanaman tanaman yang telah ada dibawah pengawasan dan bimbingan dari tenaga pendamping dan penyuluh

pertanian. Namun demikian untuk dapat meningkatkan produksi tanaman atsiri masih dibutuhkan peningkatan keterampilan petani dalam budidaya tanaman serai wangi dan penambahan alat penyulingan sehingga kapasitas produksi dapat ditingkatkan.

d. Peningkatan Pemberdayaan Petani

Peningkatan Pemberdayaan Petani dengan indikator kinerja Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani kelas kelompok tani dapat mencapai target yang ditetapkan. Dari 32 % target peningkatan kelas kemampuan kelompok tani terealisasi sebesar 36,67 % pada tahun 2022 dengan capaian kinerja sebesar 114,59 %. Adapun jumlah kelompok tani yang ada sebanyak 60 kelompok dimana dari 18 kelompok tani tingkat madya pada tahun 2021, naik 4 kelompok tani pada tahun 2022 sehingga kelompok tani tingkat madya menjadi 22 kelompok, 32 tingkat lanjut dan 6 kelompok tingkat pemula.

Guna mendukung capaian target kedepannya perlu ditingkatkan pembinaan dan pendampingan serta motivasi bagi kelompok tani agar dapat menjadi kelompok tani madya sehingga juga dapat meningkatkan pemahaman terhadap aktifitas pertanian yang dilakukan.

E Peningkatan Agribisnis

Peningkatan Agribisnis dengan indikator pelaku agribisnis perikanan yang dibina, target yang dicapai sebesar 83,33 % dengan capaian kinerja 83,33 %. Adapun jumlah pelaku agribisnis perikanan yang aktif dan dilakukan pembinaan pada tahun 2022 adalah sebanyak 5 kelompok dari 6 kelompok yang ada pada tahun 2022. Penurunan kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar) terjadi karena karena kelompok yang tidak aktif dan tidak lagi melakukan pengolahan khusus produk perikanan.

Meskipun pelaku agribisnis perikanan pada tahun 2022 mengalami penurunan, namun upaya pendampingan dan pembinaan tetap dilakukan untuk lebih meningkatkan produksi dan diversifikasi produk disamping juga dilakukan upaya oleh dinas dengan adanya penumbuhan baru dan mendorong masyarakat pelaku agribisnis khususnya perikanan untuk membentuk kelompok sehingga mudah dilakukan pembinaan dan monitoring sehingga pemasarannya juga lebih luas dan berdaya saing dengan produk lainnya.

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota Solok yaitu:

1. Belum optimalnya pemasaran hasil produksi pertanian
2. Masih lemahnya kelembagaan petani
3. Perlunya Perubahan Cara Pandang Petani akan Bantuan Pemerintah
4. Rendahnya Kualitas SDM Pertanian dan Regenerasi Petani
5. Laju konversi lahan pertanian ke non pertanian yang cenderung meningkat
6. Anomali iklim yang berpotensi mempengaruhi produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
7. Adanya ancaman penyakit yang strategis baik yang sporadi maupun exotis baik pada ternak besar, ternak kecil maupun unggas
8. Perlunya optimalisasi kesehatan masyarakat veteriner
9. Perlunya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Pertanian.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan rencana dokumen daerah dengan periode 1 tahun yang memuat daftar program dan Kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA OPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Dalam Rancangan Awal RKPD terdapat 9 program pada 2 urusan pemerintahan yang tercantum dalam RENJA Dinas Pertanian yaitu :

A. Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
2. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian

Sehubungan dengan telah ditetapkan RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026, bahwa isu strategis yang sejalan dengan visi misi Dinas Pertanian Kota Solok adalah pemulihan ekonomi kerakyatan. Untuk menangani isu tersebut maka yang akan dijadikan tujuan oleh Dinas Pertanian dalam jangka waktu 2021-2026 adalah "Peningkatan Kesejahteraan Petani". Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pertanian serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang, Dinas Pertanian menetapkan sasaran :

- a. Meningkatnya Produktifitas Perikanan
- b. Meningkatnya Peningkatan Produktifitas Hewan Ternak
- c. Meningkatnya Produktifitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- d. Meningkatnya Pemberdayaan Petani
- e. Meningkatnya Agribisnis

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian selama periode 2021-2026 diperlukan program-program yang dapat menjawab tantangan dan permasalahan serta kesinambungan program dan kegiatan yang diperlukan untuk lima tahun ke depan dibagi menurut lokalitas Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan kewilayahan. Pada Rancangan Awal tahun 2023, dengan tetap mengacu pada RPJMD 2021-2026 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian maka program dan kegiatan yang direncanakan 9 program dengan 22 kegiatan dan 43 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 12.500.00000-. dengan sumber dana dari APBD Kota Solok, Namun berdasarkan hasil review dan analisis maka terjadi penyempurnaan menjadi 8 program dengan 19

dan analisis maka terjadi penyempurnaan menjadi 8 program dengan 19 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 10.142.792.310,-, dengan sumber dana dari APBD Kota Solok, selain itu juga akan direncanakan beberapa kegiatan yang akan diusulkan melalui dana APBN atau TP.

Berdasarkan pertimbangan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas, ada beberapa kegiatan yang telah direncanakan pada tahap awal RKPD, ditunda pelaksanaan pada RKPD 2024, yaitu :

- a. Sub Kegiatan PengawasaTangkap di Wilayah Sungai, Danau, Rawa dan Genangan air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kab/Kota
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
- c. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- e. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- f. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
- h. Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

Sedangkan untuk sub kegiatan yang tidak direncanakan pada tahap awal perencanaan, namun karena adanya usulan dari masyarakat , maka dilakukan penmabahan, terdapat 1 sub kegiatan yaitu : Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya, berupa pengadaan traktor dan pembangunan pondok pertamun kelompok tani.

Untuk lebih jelasnya bagaimana review Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dapat di lihat pada **Tabel 2.4**

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN
2024, KOTA SOLO

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Ketahanan					
Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Pencapaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Ketahanan Desain/Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
	DINAS PERTANIAN					DINAS PERTANIAN					
3	URUSAN PEMERINTAHAN PUBLIK				12.500.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN PUBLIK				10.142.792.310	
3	BIDANG KETAUTAN DAN PERIKANAN				492.000.000	KELAUTAN DAN PERIKANAN				223.866.000	
3	PROGRAM: PENGOLAHAN PERIKANAN BERIDAYA		Jumlah benih bertanam yang digunakan (ekor)	590.000	350.000.000	PROGRAM: PENGOLAHAN PERIKANAN BERIDAYA		Jumlah benih bertanam yang digunakan (ekor)	290.000	212.500.000	
3	KEGIATAN: Pemberdayaan Pembiut Daya Ikan Kecil		Jumlah produksi Perikanan (Ton)	158		KEGIATAN: Pemberdayaan Pembiut Daya Ikan Kecil		Jumlah produksi Perikanan (Ton)	158		
3	Sub Kegiatan: Peningkatan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Ko Sukoharjo	Jumlah kelompok Usaha yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	4	150.000.000	Sub Kegiatan: Peningkatan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Ko Sukoharjo	Jumlah kelompok Usaha yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	4	53.490.000	
3	KEGIATAN: Pengadaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah kelompok Pembudidayaan Ikan Yang Dibina (Kelompok)	47	200.000.000	KEGIATAN: Pengadaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah kelompok Pembudidayaan Ikan Yang Dibina (Kelompok)	47	159.050.000	
3	Sub Kegiatan: Peningkatan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	2	150.000.000	Sub Kegiatan: Peningkatan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	2	153.024.000	
3	Sub Kegiatan: Peningkatan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1	50.000.000	Sub Kegiatan: Peningkatan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1	5.124.000	
3	PROGRAM: PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN		Luas Perairan umum yang diawasi (Ha)	3	12.000.000	PROGRAM: PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN		Luas Perairan umum yang diawasi (Ha)	3	0	
3	KEGIATAN: Penguasaan Sumberdaya Perikanan di Wilayah		Jumlah poknaswas yang di fasilitasi (kelompok)	2	12.000.000	KEGIATAN: Penguasaan Sumberdaya Perikanan di Wilayah		Jumlah poknaswas yang di fasilitasi (kelompok)	2	0	
3	2.01	Sub Kegiatan: Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusulkan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusulkan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	12.000.000	Sub Kegiatan: Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusulkan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusulkan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	
3	2.01	PROGRAM: PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi agribisnis perikanan yang dibina (%)	100	130.000.000	PROGRAM: PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Persentase produksi agribisnis perikanan yang dibina (%)	100	11.326.000	
			Konsumsi Ikan (Kg/bapth)	39,50				Konsumsi Ikan (Kg/bapth)	39,50		
3	2.01	KEGIATAN: Penyediaan Dan Penyediaan Bahan Baku Industri	Jumlah Petaku usaha Pengolahan Ikan Yang Dibina (Kelompok)	2	130.000.000	KEGIATAN: Penyediaan Dan Penyediaan Bahan Baku Industri		Jumlah Petaku usaha Pengolahan Ikan Yang Dibina (Kelompok)	2	11.326.000	
3	2.01	Sub Kegiatan: Peningkatan Ketersediaan Sarana untuk Konsumsi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Petaku usaha Pengolahan Ikan Yang Dibina (Kelompok)	2	100.000.000	Sub Kegiatan: Peningkatan Ketersediaan Sarana untuk Konsumsi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ko Sukoharjo	Jumlah Petaku usaha Pengolahan Ikan Yang Dibina (Kelompok)	2	11.326.000	
			Jumlah Petaku usaha Pengolahan Ikan Yang Dibina (Kelompok)	2				Jumlah Petaku usaha Pengolahan Ikan Yang Dibina (Kelompok)	2		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Pencapaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3 28 5 2.01 2	Sub Kegiatan: Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam Satu Daerah		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Kelompok)	2	30,000,000	Sub Kegiatan: Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam Satu Daerah		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Kelompok)	2	0	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					12,008,000,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					9,918,926,310
3 8 01	PROGRAM: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ko. Solok	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor (%)	100	9,702,000,000	PROGRAM: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ko. Solok	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor (%)	100	9,021,126,010	
3 27 01 2.01	KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlayannya kebutuhan kantor (tahun)	1	11,400,000	KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlayannya kebutuhan kantor (tahun)	1	1,975,400	
3 27 01 2.01 01	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	10,000,000	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	1,579,000	
3 27 01 2.01 07	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	16	1,400,000	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	16	206,400	
3 27 01 2.02	KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlayannya kebutuhan kantor (tahun)	1	7,243,000,000	KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlayannya kebutuhan kantor (tahun)	1	6,935,488,404	
3 27 01 2.02 01	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ko. Solok	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 orang/bulan	7,200,000,000	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ko. Solok	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 orang/bulan	6,935,488,404	
3 27 1 2.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	40,000,000	Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	0	
3 27 1 2.07	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan		Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	4	3,000,000	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	4	0	
3 27 01 2.03	KEGIATAN: Administrasi Barang pada Perangkat Daerah		Terlayannya kebutuhan kantor (tahun)	1	18,000,000	KEGIATAN: Administrasi Barang pada Perangkat Daerah		Terlayannya kebutuhan kantor (tahun)	1	0	
3 27 01 2.03 04	Sub Kegiatan: Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	18,000,000	Sub Kegiatan: Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	0	
3 27 01 2.05	KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ko. Solok	Terlayannya kebutuhan kantor (tahun)	1	50,000,000	KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ko. Solok	Terlayannya kebutuhan kantor (tahun)	1	0	
3 27 01 2.05 09	Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek (Orang)	3	50,000,000	Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek (Orang)	3	0	
3 27 01 2.06	KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlayannya kebutuhan kantor (tahun)	1	390,000,000	KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlayannya kebutuhan kantor (tahun)	1	217,496,000	
3 27 1 2.06 01	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	1	75,000,000	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	1	7,524,000	
3 27 1 2.06 03	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	1	100,000,000	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	1	0	
3 27 1 2.06 04	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ko. Solok	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	2	110,000,000	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ko. Solok	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	2	59,868,400	
3 27 1 2.06 05	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	2	25,000,000	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	2	24,999,600	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Pencapaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3.27.1.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	80,000,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	125,004,000	
3.27.01.2.07	KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah		Terlayannya kebutuhan kantor (tahun)	1	237,050,000	KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Terlayannya kebutuhan kantor (tahun)	1	103,000,000	
3.27.1.2.07.05	Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Unit)	30	74,050,000	Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Unit)	30	0	
3.27.1.2.07.06	Sub kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	8	60,000,000	Sub kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	8	0	
3.27.1.2.07.08	Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	1	103,000,000	Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	1	103,000,000	
3.27.1.2.08	KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlayannya kebutuhan kantor (tahun)	1	1,302,550,000	KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlayannya kebutuhan kantor (tahun)	1	1,366,637,706	
3.27.1.2.08.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ko. Solok	1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	2,550,000	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ko. Solok	1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1,279,000	
3.27.1.2.08.02	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	250,000,000	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	263,948,706	
3.27.1.2.08.04	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	1,050,000,000	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	1,102,310,000	
3.27.1.2.09	KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah		4 Terlayannya kebutuhan kantor (tahun)	1	450,000,000	KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		4 Terlayannya kebutuhan kantor (tahun)	1	396,528,500	
3.27.1.2.09.02	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		5 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	81	410,000,000	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		5 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	81	356,528,500	
3.27.1.2.09.11	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ko. Solok	1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)	101	40,000,000	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ko. Solok	1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)	101	40,000,000	
3.27.02	PROGRAM: PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN		2 Persentase pemenuhan absintan (%)	85	658,000,000	PROGRAM: PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA		2 Persentase pemenuhan absintan (%)	85	462,899,500	
			3 Persentase ketersediaan pupuk (%)	87				3 Persentase ketersediaan pupuk (%)	87		
			4 Persentase peningkatan populasi ternak					4 Persentase peningkatan populasi ternak			
			- Sapi (%)	4,99				- Sapi (%)	4,99		
		Ko. Solok	1 - Unggas (%)	4,95			Ko. Solok	1 - Unggas (%)	4,95		
			2 - Kambing (%)	5,00				2 - Kambing (%)	5,00		
			3 Persentase pemakaian benih bersertifikat					3 Persentase pemakaian benih bersertifikat			
		Ko. Solok	1 - Padi (%)	30			Ko. Solok	1 - Padi (%)	30		
			2 - Serai wangi (%)	100				2 - Serai wangi (%)	100		
			3 - Kopi (%)	100				3 - Kopi (%)	100		
			4 Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (unggulan)				Kota Solok	4 Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (unggulan)			
			- Padi (%)	0,26				- Padi (%)	0,26		
			- Serai wangi (%)	3,00			Kota Solok	- Serai wangi (%)	3,00		
			- Kopi (%)	5				- Kopi (%)	5		
3.27.02.2.01	KEGIATAN: Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Persentase ketersediaan pupuk bersubsidi (%)	53	20,000,000	KEGIATAN: Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Persentase ketersediaan pupuk bersubsidi (%)	53	2,425,000	

Rencana Kerja dan Hasil						Rencana Anggaran					
Kode		Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Keterangan
				Ko Subak	270				Ko Subak	270	
3.27.02.1.01.01		Sub Kegiatan Pengembangan Pengawasan Sarana Produksi Perikanan sesuai dengan ketentuan, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi		jumlah pengawasan perikanan papak bersubsidi (Kali)	12	20.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Pengawasan Sarana Produksi Perikanan sesuai dengan ketentuan, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi		jumlah pengawasan perikanan papak bersubsidi (Kali)	12	2.425.000
3.27.02.2.02		KEGIATAN: Penelitian Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Berkearifan Kabupaten Kota		1. Luas lahan yang dikuasai benih unggul yang bersertifikat (Ha)		270.000.000	KEGIATAN: Penelitian Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Berkearifan Kabupaten Kota		1. Luas lahan yang dikuasai benih unggul yang bersertifikat (Ha)		22.474.500
				Ko Subak					Ko Subak		
				1 - Paki	268				1 - Paki	268	
				2 - Serai wangi	50.433				2 - Serai wangi	50.433	
				3 - Kayu	40				3 - Kayu	40	
				4 - Cabe	19				4 - Cabe	19	
				5 - Bawang merah	19.25				5 - Bawang merah	19.25	
3.27.02.2.02.01		Sub Kegiatan Penanaman Kemurnian dan Ketahanan SDG Hewan/Tanaman		6. Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dilakukan Pelebaran dan Penanaman (VULB)	1	294.000.000	Sub Kegiatan Penanaman Kemurnian dan Ketahanan SDG Hewan/Tanaman		6. Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dilakukan Pelebaran dan Penanaman (VULB)	1	216.774.500
3.27.02.2.02.01		Sub Kegiatan Penanaman Kualitas SDG Hewan/Tanaman (dokumen)		1. Jumlah Pelebaran Penanaman Kualitas SDG Hewan/Tanaman (dokumen)	4	135.000.000	Sub Kegiatan Penanaman Kualitas SDG Hewan/Tanaman		1. Jumlah Pelebaran Penanaman Kualitas SDG Hewan/Tanaman (dokumen)	4	4.200.000
3.27.02.2.02.01		Sub Kegiatan Penanaman SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)		2. Jumlah Penanaman SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3	145.000.000	Sub Kegiatan Penanaman SDG Hewan/Tanaman		2. Jumlah Penanaman SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3	0
3.27.02.2.06		KEGIATAN: Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang Sehat dan Berkualitas		1. Jumlah Persiapan persediaan Benih/Bibit Ternak yang Sehat dan Berkualitas (Dokumen)	100	68.000.000	KEGIATAN: Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang Sehat dan Berkualitas		1. Jumlah Persiapan persediaan Benih/Bibit Ternak yang Sehat dan Berkualitas (Dokumen)	100	205.300.000
3.27.02.2.06.01		Sub Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang Sehat dan Berkualitas		2. Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sehat dan Berkualitas Kabupaten/Kota Lain	750 ekor	68.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang Sehat dan Berkualitas Kabupaten/Kota Lain		2. Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sehat dan Berkualitas Kabupaten/Kota Lain	750 ekor	215.300.000
3.27.02.2.02		KEGIATAN: Pengembangan Prasarana Perikanan		1. Persentase keberhasilan persediaan persediaan (%)	83	550.000.000	KEGIATAN: Pengembangan Prasarana Perikanan		1. Persentase keberhasilan persediaan persediaan (%)	83	343.700.000
3.27.02.2.02		KEGIATAN: Pengembangan Prasarana Perikanan		2. Jumlah persediaan persediaan yang dibangun (Paket)	5	450.000.000	KEGIATAN: Pengembangan Prasarana Perikanan		2. Jumlah persediaan persediaan yang dibangun (Paket)	5	343.700.000
3.27.02.2.02.01		Sub Kegiatan Pengembangan Prasarana Perikanan		3. Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dan di pelihara (unit)	2	300.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Prasarana Perikanan		3. Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dan di pelihara (unit)	2	22.796.000
3.27.02.2.02.03		Sub Kegiatan Pengembangan Prasarana Perikanan		Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Perikanan (Unit)	1	250.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Prasarana Perikanan		Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Perikanan (Unit)	1	0
3.27.02.2.02.04		Sub Kegiatan Pengembangan Prasarana Perikanan		Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Perikanan (Unit)	3	-	Sub Kegiatan Pengembangan Prasarana Perikanan		Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Perikanan (Unit)	3	120.000.000
3.27.04		PROGRAM: PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN		Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular (%)	100	474.000.000	PROGRAM: PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN		Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular (%)	100	120.000.000

Kode	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Pencapaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3 27 04 2 01	KEGIATAN: Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan	Kota Solok	1 Persentase kesembuhan penyakit hewan (%)	95	556,825,000	KEGIATAN: Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan	Kota Solok	1 Persentase kesembuhan penyakit hewan (%)	95	556,825,000	
3 27 04 2 01 01	Sub kegiatan: Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		Persentase pengendalian Kasus Rabies (%)	100	69,000,000	Sub kegiatan: Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		Persentase pengendalian Kasus Rabies (%)	100	59,878,500	
3 27 04 2 02	KEGIATAN: Pengawasan Pemasyarakatan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan		1 Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Laporan)	1	69,000,000	Sub kegiatan: Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		1 Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Laporan)	1	59,878,500	
3 27 04 2 02 02	Sub Kegiatan: Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasyarakatan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan		1 Jumlah pemotongan ternak di RPH sesuai dengan standar MUI dan ASUH (Ekor)	2,900	220,000,000	KEGIATAN: Pengawasan Pemasyarakatan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah		1 Jumlah pemotongan ternak di RPH sesuai dengan standar MUI dan ASUH (Ekor)	2,900	58,000,000	
3 27 04 2 03	KEGIATAN: Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kota Solok	2 Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasyarakatan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	1	220,000,000	Sub Kegiatan: Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasyarakatan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan		2 Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasyarakatan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	1	58,000,000	
3 27 04 2 03 02	Sub Kegiatan: Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		1 Jumlah pelayanan kesehatan hewan di UPTD Puskesmas (Ekor)	2,706	160,000,000	KEGIATAN: Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik	Kota Solok	1 Jumlah pelayanan kesehatan hewan di UPTD Puskesmas (Ekor)	2,706	21,094,300	
3 27 04 2 04	KEGIATAN: Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan		2 Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	12	160,000,000	Sub Kegiatan: Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		2 Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	12	21,094,300	
3 27 04 2 04 02	Sub Kegiatan: Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		3 Jumlah Pemotongan ternak qurban sesuai persyaratan teknis kesmavet dan halal	700	25,000,000	KEGIATAN: Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		3 Jumlah Pemotongan ternak qurban sesuai persyaratan teknis kesmavet dan halal	700	11,900,000	
3 27 5	PROGRAM: PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN		4 Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	1	25,000,000	Sub Kegiatan: Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		4 Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	1	11,900,000	
3 27 5 2 01	KEGIATAN: Pengendalian dan Penanggulangan Bencana		5 Persentase Penurunan Luas Serangan OPT	100	14,000,000	PROGRAM: PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA		5 Persentase Penurunan Luas Serangan OPT	100	5,000,000	
3 27 5 2 01 01	Sub Kegiatan: Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		6 Persentase Pengendalian Serangan OPT (%)	14	14,000,000	KEGIATAN: Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		6 Persentase Pengendalian Serangan OPT (%)	14	5,000,000	
3 27 7	PROGRAM: PENYULUHAN PERTANIAN		7 Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan (Ha)	5	14,000,000	Sub Kegiatan: Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		7 Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan (Ha)	5	5,000,000	
3 27 7 2	KEGIATAN: Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kota Solok	8 Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh (%)	90	610,000,000	PROGRAM: PENYULUHAN PERTANIAN		8 Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh (%)	90	135,528,000	
			9 Persentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani (%)	36				9 Persentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani (%)	36		
			10 Persentase peningkatan petani milenial (%)	1				10 Persentase peningkatan petani milenial (%)	1		
			Persentase cakupan bina kelompok tani (%)	60				Persentase cakupan bina kelompok tani (%)	60		
			1 Jumlah penyuluh yang dapat mendemonstrasikan informasi teknologi pertanian (%)	95	610,000,000	KEGIATAN: Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kota Solok	1 Jumlah penyuluh yang dapat mendemonstrasikan informasi teknologi pertanian (%)	95	135,528,000	
			2 Persentase Peningkatan Penerapan Teknologi oleh Keltan yang dicapai Penyuluh	75				2 Persentase Peningkatan Penerapan Teknologi oleh Keltan yang dicapai Penyuluh	75		
			3 Persentase Anggota Kelembagaan Petani yang aktif	88				3 Persentase Anggota Kelembagaan Petani yang aktif	88		
			4 Persentase kelembagaan petani yang aktif	98				4 Persentase kelembagaan petani yang aktif	98		

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Anggaran				Realisasi Anggaran				Catatan
		Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Tingkat Pencapaian Kinerja	Pagu Indikatif	Uraian/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Pencapaian Kinerja	Keluaran Data/Pagu Indikatif (Rp)	
3.27.1.2.01.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	5. Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang diliputi oleh Kapasitasnya		3	115.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	5. Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang diliputi oleh Kapasitasnya	3	11.850.000	
3.27.1.2.01.02	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1. Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang diliputi oleh Kapasitasnya (Unit)		66	320.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1. Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang diliputi oleh Kapasitasnya (Unit)	66	68.625.000	
3.27.1.2.01.03	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Pemasaran Sana dan Prasarana Penyuluhan	2. Jumlah Sana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		11	120.000.000	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Pemasaran Sana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2. Jumlah Sana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	11	40.251.500	
3.27.1.2.01.04	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	3. Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang terbentuk dan beroperasi (unit)		21	55.000.000	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	3. Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang terbentuk dan beroperasi (unit)	21	14.997.500	


 Kepala Dinas Pertanian
 Kota Sukoharjo
 NIP. 19660805 200604 1 011

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Dinas Pertanian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kota Solok melalui pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan pertanian dan pendekatan atas-bawah (*top down*), dan bawah-atas (*bottom-up*) yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah. Forum untuk menjaring aspirasi dan usulan kegiatan yang berkaitan dengan pertanian dan peternakan dari kalangan non pemerintah dilakukan melalui forum resmi seperti dalam pelaksanaan musrenbangtan maupun forum tidak resmi.

Aspirasi dan usulan tersebut diverifikasi oleh Dinas Pertanian Kota Solok dan kemudian dilakukan kajian lebih lanjut mengenai keterkaitan usulan kegiatan dengan arah pembangunan pertanian seperti yang tertuang dalam Review Renstra Dinas Pertanian, kebutuhan serta keterkaitan dengan isu-isu penting pembangunan pertanian di Kota Solok.

Tabel 2.4

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2024**

DINAS PERTANIAN KOTA SOLOK					
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
I	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
1	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lainnya				
	Sub Kegiatan				
	1. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kelurahan Kamp. Jawa	- pengadaan induk kuda pacu	1 ekor	Usulan melalui Pokir ini dapat diakomodir dalam renja 2024 karena bermanfaat untuk mendukung perbaikan mutu genetik kuda pacu
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
1.	Pembangunan Prasarana Pertanian				
	Sub Kegiatan				
	1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kelurahan KTK	- Pengadaan traktor	1 Paket	Usulan melalui Pokir ini dapat diakomodir dalam renja 2024 karena bermanfaat untuk akses pertanian,
		Kelompok Tani Mato Aia	- Pembangunan Pondok pertemuan kelompok tani	1 Paket	Usulan Kelompok Masyarakat ini dapat diakomodir dalam renja 2024 karena bermanfaat untuk mendukung perasional kelompok tani,



Solok, 3 November 2023
Kepala Dinas Pertanian

Kota Solok

H. ZULKIFLI, SP

NIP. 19660805 200604 1 003

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memerhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Kementerian Pertanian telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholders*, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth perspective* adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, dengan indikator kinerja: Peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional, dengan indikator kinerja:
 - a. Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional
 - b. Persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional
 - b. Persentase kasus pelanggaran perkarantinaaan yang diselesaikan.
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan
 - b. Teknologi yang diterapkan oleh pertanian
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan, dengan indikator kinerja:
 - a. Indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukkan
 - b. Indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukkan
6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan, dengan indikator kinerja:

- a. Persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani
 - b. Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis
 - c. Persentase tindakan karantina terhadap temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK)
7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional, dengan indikator kinerja:
- a. Persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya
 - b. Persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian
8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator kinerja:
- a. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator kinerja:
- a. Nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian.

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kementerian Pertanian (Kementan) RI 2020-2024 terdapat beberapa indikator kinerja utama Kementan yang selaras dengan RPJMD Pemerintah Kota Solok. Indikator tersebut antara lain:

1. Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri sebesar 0,1 % tiap tahunnya dari 3,7 % ditahun 2021 menjadi 4,1% ditahun 2024. Komoditas strategis yang masih menjadi perhatian utama Kementan RI adalah Padi, Jagung, Kedelai, Cabe, Bawang Merah, Tebu dan Daging Sapi/Kerbau. 7 komoditas ini masih menjadi pemicu inflasi jika terjadi peningkatan harga atau berkurangnya ketersediannya di pasar
2. Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian Nasional sebesar 0.05 % tiap tahun yang diawali sebesar 1.3% pada tahun 2020 menjadi 2% ditahun 2024
3. Teknologi yang diterapkan oleh petani menjadi salah satu hal pengungkit daya saing bangsa Indonesia. Kementerian Pertanian menargetkan sebesar 65% teknologi pertanian mampu diterapkan oleh petani pada tahun 2020 dan meningkat sehingga diakhir periode Renstra 80% teknologi telah diterapkan oleh petani

4. Ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukan. Secara nasional indeks ketersediaan prasarana pertanian baru mencapai skor 62,55 di tahun 2020 dan diharapkan meningkat sehingga pada tahun 2024 mencapai nilai 64,55
5. Ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukan sampai tahun 2020 telah mencapai indeks 77,92 dan harapan dari Pemerintah pusat indeks ini bertahan hingga akhir periode Renstra Kementan
6. Serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang tertangani. Hal ini menjadi perhatian serius dari Kementerian Pertanian karena perubahan iklim tidak bisa dihindari telah berlangsung di dunia dan tidak dapat di prediksi. Kementan RI menargetkan mampu menangani 62,56% serangan OPT dan dampak perubahan iklim pada tahun 2024
7. Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis, targetnya 81,6% wilayah di Indonesia di tahun 2024 telah mampu mengendalikan penyakit hewan menular strategis
8. SDM pertanian dan Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya. SDM merupakan aset berharga yang perlu ditingkatkan kapasitasnya agar mampu berkompetisi dengan petani-petani dari negara lain. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas produksi hasil pertanian kelembagaan petani harus mandiri dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu kementan menginginkan pada tahun 2024 lebih dari separuh (51%) SDM pertanian khususnya petani dan kelembagaan petani meningkat kapasitasnya.

3.1.2 Telaahan Kementrian Kelautan dan Perikanan RI dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan diimplementasikan dalam keterkaitannya dengan 4 Agenda / Nawacita yang dirumuskan secara umum sebagai berikut:

1. Agenda/Nawacita ke -1

Sub Agenda : Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim

Implementasi dalam memperkuat jati diri sebagai negara maritim adalah dengan meningkatkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan secara terpadu dan terintegrasi, meningkatkan sarana

dan prasarana pengawasan yang representatif, mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian Illegal fishing serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan.

2. **Agenda/nawacita ke-4**

Sub Agenda : Pemberantasan Perikanan Illegal /IUU Fishing

yang akan dilaksanakan dalam rangka pemberantasan Illegal Fishing / IUU Fishing adalah dengan meningkatkan koordinasi dalam penanganan tindak pidana perikanan, melakukan penguatan sarana sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan , meningkatkan penataan sistem perizinan usaha perikanan dan penertiban ketaatan kapal di pelabuhan perikanan.

3. **Agenda / Nawacita ke – 6**

Sub Agenda : Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui peningkatan Hasil Perikanan

Upaya yang dilaksanakan adalah melalui peningkatan mutu dan kualitas benih /induk, inovasi teknologi perikanan (budidaya, perikanan tangkap, dan pengolahan hasil perikanan), melakukan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, peningkatan SDM pelaku usaha perikanan dan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan.

4. **Agenda/Nawa cita ke-7**

Sub Agenda : Peningkatan kedaulatan Pangan melalui peningkatan produksi perikanan

Implementasi yang akan dilakukan adalah meningkatkan faktor – faktor produksi dan sarana prasarana pendukung produksi dan mempertahankan ketersediaan komoditi perikanan sebagai sumber pangan dan ekonomi.

Sub Agenda

: Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan.

Implementasi yang akan dilakukan adalah meningkatkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai sumber ekonomi pembangunan dan sebagai sumber peningkatan SDM masyarakat kelautan dan perikanan, menyediakan data dan informasi, meningkatkan harkat dan taraf hidup masyarakat nelayan masyarakat perikanan.

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen KP) RI 2020-2024 terdapat beberapa indikator kinerja utama Kemen-KP yang selaras dengan RPJMD Pemerintah Kota Solok. Indikator tersebut antara lain:

1. Meningkatnya konsumsi ikan perkapita dengan target di akhir periode Renstra sebesar 62,05 Kg/Kap/Tahun
2. Meningkatnya produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dengan target diakhir periode Renstra Kemen-KP sebesar 32,75 juta Ton.

Hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan ditemukan potensi, peluang dan tantangan bagi Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Potensi yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain:

1. Letak geografis yang sangat strategis berada dekat dengan daerah penghasil pertanian dan dekat dengan ibukota Provinsi serta persimpangan jalan menuju Provinsi Jambi dan Provinsi Riau
2. Telah memiliki *brand image* yang terkenal pada sektor tanaman pangan khususnya beras
3. Pusat perdagangan bagi hasil-hasil pertanian yang berasal dari Kabupaten Solok, Sijunjung, Dharmasraya dan Kota Sawahlunto
4. Memiliki UPTD BBI ikan yang masih beroperasi dan mulai bergerak dalam mengembangkan ikan hias
5. Memiliki UPTD Keswan (Kesehatan Hewan) yang telah mendapatkan standarisasi dari lembaga ISO

6. Memiliki UPTD RPH (Rumah Potong Hewan) yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI
7. Memiliki Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan yang telah dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai
8. Memiliki 3 buah sungai dengan panjang sekitar 14.930 meter.

3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan RPJMD

Rencana Kinerja Dinas Pertanian Kota Solok harus selaras dengan RPJMD Kota Solok. Berikut digambarkan keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMD dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.

Tabel. 3.2

Keterkaitan RPJMD Kota Solok dan Rencana Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2024

VISI : <i>Terwujudnya Kota Solok Yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Modern</i>			
MISI II : <i>Peningkatan Perekonomian Daerah yang berorientasi ekonomi kerakyatan berbasis pada potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dan didukung oleh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatkan Produktivitas Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Kapasitas Pembudidaya Ikan b. Meningkatkan sarana dan prasarana budidaya ikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah pelaku perikanan yang menerapkan CBIB 2. Meningkatkan jumlah kelompok pembudidaya ikan yang dibina 3. Meningkatkan jumlah akses informasi dan teknologi budidaya perikanan
	Meningkatkan Produktivitas Hewan	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan b. Meningkatkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyakit ternak yang ditanggulangi 2. Peningkatan keberhasilan IB (Inseminasi Buatan) 3. Meningkatkan peternak yang

	Ternak	penerapan teknologi peternakan c. Meningkatkan SDM Peternak	menerapkan peternakan intensif 4. Peningkatan pemanfaatan pakan berkualitas
	Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	a. Meningkatkan penerapan Inovasi dan Teknologi b. Meningkatkan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) c. Meningkatkan Sarana dan Prasarana pertanian	1. Peningkatan petani yang menggunakan benih bersertifikat 2. Peningkatan petani yang menerapkan paket teknologi pertanian 3. Peningkatan luas serangan OPT yang dikendalikan 4. Peningkatan pemanfaatan alsintan 5. Peningkatan ketersediaan air 6. Peningkatan ketersediaan pupuk
	Meningkatkan Pemberdayaan Petani	a. Meningkatkan Kapasitas Penyuluh b. Meningkatkan Fungsi Kelembagaan Petani c. Meningkatkan SDM Petani	1. Peningkatan kajian ilmiah oleh penyuluh 2. Peningkatan penerapan teknologi oleh kelompok tani yang dicapai penyuluh 3. Peningkatan anggota kelembagaan tani yang aktif 4. Peningkatan kelembagaan petani yang aktif 5. Peningkatan jumlah petani milenial Peningkatan petani yang menerapkan teknologi pertanian
	Meningkatkan Agribisnis	a. Meningkatkan Pelaku Agribisnis	1. Peningkatan jumlah diversifikasi agribisnis

		b. Meningkatkan SDM Pelaku Agribisnis	2. Peningkatan omset pelaku agribisnis
--	--	---------------------------------------	----------------------------------------

3.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian

Berdasarkan kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi serta visi dan misi pembangunan yang telah dirumuskan serta permasalahan yang timbul dan tantangan serta peluang dalam rangka pembangunan pertanian, maka pembangunan pertanian diarahkan pada pencapaian sasaran strategis pembangunan pertanian.

Dinas Pertanian Kota Solok pada tahun 2024 menyusun rencana kerja pembangunan pertanian dengan tujuan Peningkatan kesejahteraan petani.

Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi serta visi dan misi pembangunan yang telah dirumuskan, maka pembangunan pertanian diarahkan pada pencapaian sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2024
Dinas Pertanian

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2024
1	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya produktivitas perikanan	Jumlah benih berkualitas yang digunakan (ekor)	590.000
			Jumlah produksi perikanan (ton)	158
			Luas Perairan umum yang diawasi (Ha)	3
			Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)	39,5
		Meningkatnya produktivitas hewan ternak	Persentase peningkatan populasi ternak:	
			- Sapi (%)	4,99
			- Unggas (%)	4,95

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2024
		Meningkatnya produktivitas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	- Kambing (%)	5,00
			Persentase pengendalian Penyakit Hewan menular	100
			Persentase kesembuhan penyakit hewan	95
			Persentase pemenuhan sarana pertanian	80
			Persentase pemakaian benih bersertifikat:	
			- Padi (%)	35
			- Serai wangi (%)	100
			- Kopi (%)	100
		Meningkatnya pemberdayaan petani	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (unggulan)	
			- Padi (%)	0,26
			- Serai wangi (%)	3,00
			- Kopi (%)	5
		Meningkatnya agribisnis	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh	90
			Persentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani	36
			Persentase peningkatan petani milenial	1
			Cakupan bina kelompok tani (%)	60
			Persentase ketersediaan prasarana pertanian	85
			Persentase pelaku agribisnis perikanan yang dibina (%)	100
			Persentase penurunan luas serangan OPT	100

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PERTANIAN

4.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan terhadap Pertimbangan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana kerja Dinas Pertanian Kota Solok Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Solok tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Solok Tahun 2021 – 2026. Beberapa Faktor-Faktor yang mempengaruhi rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pertanian :

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
- Pengentasan Kemiskinan

Pada tahun 2024 direncanakan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan, terdapat pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Lain, Sub kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain berupa bantuan ternak ayam untuk KK Miskin.

4.2 Program dan Kegiatan Gender Analysis Pathway (GAP)

Untuk mendukung program Gender Analysis Pathway (GAP) di Kota Solok, Dinas Pertanian menetapkan 2 program dengan masing-masing 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Berikut table uraian program/kegiatan/sub kegiatan

1. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Lain

KOLOM 1	Perangkat Daerah	DINAS PERTANIAN KOTA SOLOK
	Program	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Kegiatan	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Lain
	Sub Kegiatan	Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
	Indikator Kerja	Pengembangan usaha peternakan mandiri
	Tujuan	Meningkatkan produksi ternak

KOLOM 2	Data Pembuka Wawasan (Data terpilah Gender)	<p><u>Data Umum :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kelompok tani sebanyak 65 kelompok dimana di dalamnya terdapat kelompok tani yang berbadan hukum sebanyak 28 kelompok - Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok: 2.039 orang, yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - 1.261 orang (perempuan), dan; - 778 orang (laki-laki) - Sebagian besar petani telah berusia di atas 40 tahun, dengan jumlah KK miskin yang masuk ke dalam kelompok tani sebanyak 819 orang - Kelompok tani ternak ada sebanyak 24 kelompok yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Ternak sapi: 19 kelompok - Ternak kambing: 2 kelompok - Ternak ayam: 2 kelompok - Ternak puyuh: 1 kelompok - Jumlah Populasi Sapi: <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2020 (ekor) : 2.508 - Tahun 2021 (ekor) : 2.617 - Tahun 2022 (ekor) : 2.574 - Jumlah Populasi Unggas: <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2020 (ekor): 364.266 - Tahun 2021 (ekor): 440.761 - Tahun 2022 (ekor) : 469.861
------------	------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOLOM 3	ISU GENDER	Faktor Kesenjangan/ Permasalahan (Akses, partisipasi, kontrol, Manfaat)	<p>Akses :</p> <p>Kegiatan hanya bisa diikuti oleh petani yang tergabung dalam kelompok tani (terdata di Simluhtan)</p> <p>Partisipasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih ada petani yang belum tergabung kedalam kelompok tani - Lebih banyak Wanita yang ikut dalam Kelompok Tani <p>Kontrol :</p> <p>Perlunya monitoring dan evaluasi terhadap status petani pada kelompok tani (keaktifannya)</p> <p>Manfaat :</p> <p>Belum maksimalnya pemanfaatan bantuan oleh petani</p>
KOLOM 4		Sebab Kesenjangan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Data terpilah belum lengkap - Keterbatasan anggaran
KOLOM 5		Sebab kesenjangan Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya minat generasi muda dalam bidang pertanian - Tingkat Ketergantungan petani pada Pemerintah masih tinggi - Yang aktif di Kelompok tani lebih banyak wanita
KOLOM 6	Reformulasi Tujuan		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Populasi dan Produksi Ternak - Meningkatkan Kesejahteraan Petani
KOLOM 7	Rencana Aksi		<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Usaha Peternakan Mandiri - Pengadaan Bibit Ternak Untuk Masyarakat Kurang Mampu - Pelayanan IB (Inseminasi Buatan)

Kolom 8	Data dasar (Base Line)		<ul style="list-style-type: none">- Jumlah kelompok tani sebanyak 65 kelompok dimana di dalamnya terdapat kelompok tani yang berbadan hukum sebanyak 28 kelompok- Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok: 2.039 orang, yang terdiri dari:<ul style="list-style-type: none">- 1.261 orang (perempuan), dan;- 778 orang (laki-laki)- Sebagian besar petani telah berusia di atas 40 tahun, dengan jumlah KK miskin yang masuk ke dalam kelompok tani sebanyak 819 orang- Jumlah Populasi Sapi:<ul style="list-style-type: none">- Tahun 2020 (ekor) : 2.508- Tahun 2021 (ekor) : 2.617- Jumlah Populasi Unggas:<ul style="list-style-type: none">- Tahun 2020 (ekor): 364.266- Tahun 2021 (ekor): 440.761
KOLOM 9	Pengukuran Hasil	Output	<ul style="list-style-type: none">- Pengembangan Usaha Peternakan Mandiri: 4 kelompok- Pengadaan Bibit Ternak Untuk Masyarakat Kurang Mampu: 5 KK- Pelayanan IB (Inseminasi Buatan): 750 kali
		Outcome	<ul style="list-style-type: none">- Berkembangnya usaha peternakan mandiri- Meningkatnya Populasi dan Produksi Ternak- Meningkatnya Pendapatan Petani

2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

KOLOM 1	Perangkat Daerah	DINAS PERTANIAN KOTA SOLOK
	Program	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Kegiatan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
	Sub Kegiatan	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
	Indikator Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghitungan Tingkat Konsumsi Ikan. 2. Lomba Masak serba ikan Tk.Kota.

		3. Lomba Masak serba Ikan TK. Provinsi 4. Pembinaan terhadap Pokhlasar 5. Sosialisasi Gemarikan
	Tujuan	Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan di Kota Solok.
KOLOM 2	Data Pembuka Wawasan (Data terpilah Gender)	<p><u>Data Umum :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pokhlasar (Kelompok Pengolah Pemasar) adalah kumpulan pengolah dan/atau pemasar hasil perikanan yang melakukan kegiatan usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bersama dalam wadah kelompok. - Jumlah Pokhlasar sebanyak 3 kelompok - Jumlah Pokhlasar tergabung dalam kelompok: 34 orang, yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - 25 orang (perempuan), dan; - 9 orang (laki-laki) - Sebagian besar anggota kelompok telah berusia diatas 40 tahun. <ul style="list-style-type: none"> - Pokhlasar mempunyai olahan yang berbahan baku ikan seperti : <ul style="list-style-type: none"> - Rendang Tuna - Dendeng Ikan - Sala Lauk - Palai Ikan - Rakik Maco - Naget Ikan - Bakso Ikan - Dan lain-lain - Lomba Masak serba ikan Tingkat Kota Solok diikuti oleh Forikan Kelurahan yang ada di Kota Solok. - Sedangkan Lomba Masak serba ikan Tingkat Provinsi diikuti oleh masing-masing perwakilan lomba masak ikan tingkat kota. - Sosialisasi Gemarikan diadakan Pada PAUD dan TK sebanyak 10 buah TK dengan mengajak anak-anak usia dini untuk mau makan ikan sehingga angka konsumsi ikan d - Kota Solok meningkat.

4.3 Uraian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pendanaan program kegiatan tahun 2024 akan didanai dengan APBD dan direncanakan Dana APBN untuk mendukung pencapaian program dan kegiatan. Program dan kegiatan Dinas Pertanian Kota Solok tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.3. Menurut kewenangan Dinas Pertanian Kota Solok menangani 2 urusan, dengan 8 Program dan 19 Kegiatan, 33 Sub Kegiatan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

a. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Kegiatan Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
- Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - a. Kegiatan Penggunaan Sarana Pertanian

Sub Kegiatan Pengawasan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
 - b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
 - c. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lainnya

Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

Sub Kegiatan :

 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
 - b. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
 - c. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

- d. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
5. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
6. Program Penyuluhan Pertanian
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
Sub Kegiatan :
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

Penjelasan rincian program/kegiatan/sub kegiatan dapat dilihat dari Tabel 4.3

Kode	URUSAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024							Sumber Usulan			Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana					Musrenbang	Renja PD	Lainnya	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
					APB	DAK	APB D Pov	APBN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DINAS PERTANIAN			10,142,792,310										14,503,925,000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			10,142,792,310										14,503,925,000
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			223,866,000										631,925,000.00
3	PROGRAM: PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah benih berkualitas yang digunakan (ekor)	590,000	212,540,000									600,000	381,925,000.00
		Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	158										159	
3	KEGIATAN: Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pelaku perikanan yang menerapkan CBIB (Kelompok)	4	53,490,000									5	158,000,000
3	Sub Kegiatan: Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	55.00	53,490,000	√						√		55.00	158,000,000
3	KEGIATAN: Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kelompok Pembudidayaan Ikan Yang Dibina (Kelompok)	47	159,050,000									47	223,925,000
3	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	2	153,925,000	√						√		2	153,925,000.00
3	Sub Kegiatan: Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1	5,125,000	√						√		1.00	70,000,000
3	PROGRAM: PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN	Luas Perairan umum yang diawasi (Ha)	3	0									3.10	25,000,000.00
3	2.01 KEGIATAN: Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pokmaswas yang di fasilitasi (kelompok)	2	0									2	25,000,000

Kode	URUSAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
					APBEDAN	APB D Pov	APBN	Musrenbang	Renja PD	Lainnya			
3	2.01	02 Sub Kegiatan: Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	√						2	25,000,000
3	25	05	PROGRAM: PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	100	11,326,000							100	225,000,000.00
			Persentase pelaku agribisnis perikanan yang dibina (%)	39.50								41.8	
3	25	05	2.01 KEGIATAN: Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	11,326,000							2	225,000,000.00
3	25	5	2.01 1 Sub Kegiatan: Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	11,326,000	√			√			2	115,000,000.00
3	25	5	2.01 2 Sub Kegiatan: Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam Satu Daerah	2	0	√			√				110,000,000.00
3	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		9,918,926,310								13,872,000.000
3	27	02	PROGRAM: PENYEDIAAN DANPENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	85	462,699,500								870,000,000.00
			Persentase pemenuhan alsintan (%)	87								85	
			Persentase ketersediaan pupuk (%)	87								87	
			Persentase peningkatan populasi Ternak										
			- Sapi (%)	4.99								5	
			- Unggas (%)	4.95								4.95	
			- Kambing (%)	5.00								5.00	
			Persentase pemakaian benih Bersertifikat										
			- Padi (%)	30								40	
			- Serai wangi (%)	100								100	
			- Kopi (%)	100								100	
			Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (unggulan)										
			- Padi (%)	0.26								0.28	
			- Serai wangi (%)	3.00								3.00	
			- Kopi (%)	5								6.00	

Kode	URUSAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana					Sumber Lain			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
					APBID ID	APB ID	APB ID	APB ID	Resja PD	Resja Lainnya	Resja Lainnya			
3 27 02 2 01	KEGIATAN: Penguasaan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase ketersediaan pupuk bersubsidi (%)	53	2.425.000									54	120.000.000,00
		Jumlah ketersediaan Asintan	270											120.000.000,00
3 27 02 2 01 01	Sub Kegiatan: Penguasaan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah penguasaan penyuluran pupuk bersubsidi (Kali)	12	2.425.000	✓			✓					12	120.000.000,00
3 27 02 2 02	KEGIATAN: Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	Luas lahan yang ditanami benih unggul yang bersertifikat (Ha)		224.974.500										675.000.000,00
		- Padi	263										306	
		- Serai wangi	50.433										52.43	
		- Kopi	40										45	
		- Cabe	19										20	
		- Bawang merah	19,25										19,37	
3 27 02 2 02 01	Sub Kegiatan: Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dilakukan Pelesterian dan Pemurnian (VUB)	1	216.774.500	✓									350.000.000
3 27 02 2 02 01	Sub Kegiatan: Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (dokumen)	4	8.200.000	✓									150.000.000,00
3 27 02 2 02 01	Sub Kegiatan: Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3	0	✓									175.000.000,00
3 27 02 2 06	KEGIATAN: Penyediaan Benih/Bibit Terak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbarnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lainnya	Jumlah Peternak penerima Bantuan Usaha Peternakan (Orang)	100	235.300.000										75.000.000,00
3 27 02 2 06 01	Sub Kegiatan: Pengadaan Benih/Bibit Terak yang Sumbarnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Terak yang Sumbarnya dan Daerah Kabupaten/Kota Lain	700 ekor	235.300.000										75.000.000,00
3 27 03	PROGRAM: PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	Persentase ketersediaan prasarana pertanian (%)	83	143.700.000									85	750.000.000,00
3 27 03 2 02	KEGIATAN: Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun (Paket)	5	143.700.000									5	750.000.000,00
3 27 03 2 02 01	Sub Kegiatan: Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dan di pelihara (unit)	2	23.700.000	✓			✓						450.000.000,00
3 27 03 2 02 03	Sub Kegiatan: Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pertanian	Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pertanian (Unit)	1	0	✓			✓						300.000.000,00
27 27 03 2 02 09	Sub Kegiatan: Pembangunan,	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi	3	120.000.000	✓			✓						0,00

Kode	URUSAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024										Perkiraan Maju Tahun 2025		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana					Sumber Usulan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	
					APBD	APB D	APB M	Musrenbang	PD	Rencana Lainnya	PD	Lainnya			
3 27 04	PROGRAM: PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN	Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular (%)	100	150,872,800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	550,000,000.00	75
3 27 04 2 01	KEGIATAN: Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan	Persentase kesembuhan penyakit hewan (%)	95	556,825,000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	96	75,000,000.00	76
3 27 04 2 01 01	Sub kegiatan: Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase pengendalian Kursus Rabies (%)	100	59,878,500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	75,000,000.00	77
3 27 04 2 02	KEGIATAN: Pengawasan Pemusnahan dan Pengaliran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemotongan ternak di RPH sesuai dengan standar MLI dan ASUH (Ekor)	2,900	58,000,000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,950	260,000,000.00	78
3 27 04 2 02 02	Sub Kegiatan: Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemusnahan dan/atau Pengaliran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemusnahan dan/atau Pengaliran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	1	58,000,000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	260,000,000.00	79
3 27 04 2 03	KEGIATAN: Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik	Jumlah pelayanan kesehatan hewan di UPTD Puskesmas (Ekor)	2,706	21,094,300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,964	190,000,000.00	80
3 27 04 2 03 02	Sub Kegiatan: Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	12	21,094,300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12	190,000,000.00	81
3 27 04 2 04	KEGIATAN: Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pemotongan ternak qurban sesuai persyaratan teknis kemasv et dan halal	700	11,900,000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	750	25,000,000.00	82
3 27 04 2 04 02	Sub Kegiatan: Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	1	11,900,000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	25,000,000.00	83
3 27 5	PROGRAM: PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penurunan Luas Serangan OPT	100	5,000,000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	100,000,000.00	84
3 27 5 2 01	KEGIATAN: Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Serangan OPT (%)	14	5,000,000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16	100,000,000.00	85
3 27 5 2 01 01	Sub Kegiatan: Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan (ha)	5	5,000,000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5	100,000,000.00	86

Kode	URUSAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024										Sumber Usulan			Pertimbangan Maju Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana					Renja PD	Lainnya	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)				
					APBIDAK	APB D	APB: Musrenbang	Pov									
3 27 7	1	PROGRAM: PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh (%)	90	135,528,000									95	750,000,000.00		
			Persentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani (%)	36										38			
			Persentase peningkatan petani milenial (%)	1										1			
			Persentase cakupan bina kelompok tani (%)	60										80			
3 27 7	2	KEGIATAN: Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh yang dapat mendiseminasiakan Informasi teknologi pertanian (%)	95	135,528,000									100	750,000,000.00		
			Persentase Peningkatan Penerapan Teknologi oleh Keltan yang dicapai Penyuluh	75										80			
			Persentase Anggota Kelembagaan Petani yang aktif	88										92			
			Persentase kelembagaan petani yang Aktif	98										99			
3 27 7	2 1	Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	3	11,850,000	✓					✓				150,000,000.00		
3 27 7	2.01 02	Sub Kegiatan: Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	60	68,625,000	✓					✓				350,000,000.00		
3 27 7	2.01 03	Sub Kegiatan: Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1	40,055,500	✓					✓				150,000,000.00		
3 27 7	2.01 04	Sub Kegiatan: Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang terbentuk dan beroperasi (unit)	2	14,997,500	✓					✓			3 kg	100,000,000.00		
3 # 01		PROGRAM: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor (%)	100	9,021,126,010									100	10,852,000,000.00		
3 27 01 2.01		KEGIATAN: Perencanaan,	Terlayannya kebutuhan kantor	1	1,975,400												
3 27 01 2.01 01		Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	1,679,000	✓					✓			1	45,000,000.00		
3 27 01 2.01 07		Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	16	296,400	✓					✓			2	25,000,000.00		
														16	20,000,000.00		

Kode	URUSAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024										Perkiraan Maja Tahun 2025				
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana					Sumber Usulan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
					APBUD	APBID	APBMD	APBMD	APBMD	Renja PD	Lainnya						
3 27 01 2 02	KEGIATAN: Administrasi Keuangan	Terlayannya kebutuhan kantor Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	6,935,488,404	✓					✓			17,549,000,000.00	17,549,000,000.00			
3 27 01 2 02 01	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		51 orang/bulan	6,935,488,404	✓					✓			517,500,000,000.00	517,500,000,000.00			
3 27 1 2 01	Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	0	✓					✓			1	45,000,000.00			
3 27 1 2 07	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD (Laporan)	4	0	✓					✓			4	4,000,000.00			
3 27 01 2 03	KEGIATAN: Administrasi Barang pada Perangkat Daerah	Terlayannya kebutuhan kantor (tahun)	1	0									1	20,000,000.00			
3 27 01 2 03 04	Sub Kegiatan: Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	0	✓					✓				20,000,000.00			
3 27 01 2 05	KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlayannya kebutuhan kantor (tahun)	1	0										75,000,000.00			
3 27 01 2 05 09	Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek (Orang)	3	0	✓					✓				75,000,000.00			
3 27 01 2 06	KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlayannya kebutuhan kantor (tahun)	1	217,496,000										540,000,000.00			
3 27 1 2 06 01	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	1	7,624,000	✓					✓				75,000,000.00			
3 27 1 2 06 03	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	1	0	✓					✓				125,000,000.00			
3 27 1 2 06 04	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	2	59,868,400	✓					✓				135,000,000.00			
3 27 1 2 06 05	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	2	24,999,600	✓					✓				30,000,000.00			
3 27 1 2 06 09	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (tahun)	12	125,004,000	✓					✓				175,000,000.00			
3 27 01 2 07	KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Terlayannya kebutuhan kantor (tahun)	1	103,000,000	✓					✓				540,000,000.00			
3 27 1 2 07 05	Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Unit)	30	0										75,000,000.00			
3 27 1 2 07 06	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	8	0										265,000,000.00			
3 27 1 2 07 09	Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	1	103,000,000	✓					✓				200,000,000.00			
3 27 1 2 08	KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Terlayannya kebutuhan kantor (tahun)	1	1,366,637,706										1,518,000,000.00			

Kode	URUSAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024							Sumber Usulan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana					Renja PD	Lainnya			
					APBD	DAK	APB D Pov	APBN	Musrenbang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3 27 1 2.08 01	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1,279,000	√						√			3,000,000.00
3 27 1 2.08 02	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	263,048,706	√						√			265,000,000.00
3 27 1 2.08 04	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	1,102,310,000	√						√			1,250,000,000.00
3 27 1 2.09	KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlayannya kebutuhan kantor (tahun)	1	396,528,500	√						√			565,000,000.00
3 27 1 2.09 02	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81	356,528,500										475,000,000.00
3 27 1 2.09 11	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)	101	40,000,000	√						√			90,000,000.00


 Solok, November 2023
 KEPALA DINAS PERTANIAN &
 KOTA SOLOK
 H. ZULKIFLI, SP
 NIP. 19660805 200604 1 063

BAB V PENUTUP

Dinas Pertanian Kota Solok sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pertanian dan Perikanan berada serta bertanggung jawab kepada Walikota Solok melalui Sekretaris Daerah. Untuk itu, telah menjadi keharusan untuk sama-sama mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.

Kota Solok sebagai suatu kota yang terus berkembang dengan kontribusi PDRB yang terbesar adalah sektor Jasa dan Perdagangan, namun sektor Pertanian tetap harus mendapatkan perhatian yang serius karena sebahagian masyarakat Kota Solok masih bergerak pada sektor Pertanian, disamping itu Kota Solok telah dikenal dengan Beras Solok yang harus tetap dipertahankan.

Komitmen Pemerintah harus diperkuat untuk mempertahankan lahan Pertanian yang produktif, terutama lahan sawah dan tidak dialih fungsikan untuk kebutuhan lain sehingga produksi pertanian tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri.

Disadari bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal tidaklah mudah, namun kita tetap optimis bahwa target tersebut dapat dicapai apabila para pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang menjadi faktor penghambat utama serta memberikan dorongan yang diyakini akan menjadi faktor kunci pengungkit keberhasilan.

Renja PD yang merupakan dokumen rencana pembangunan masing-masing PD dan juga merupakan pemutakhiran rencana kerja dari Renstra masing-masing PD yang berjangka waktu satu tahun, memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang bersangkutan, yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD (RKA-SKPD).

Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Pertanian berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renja Dinas Pertanian ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renja Dinas Pertanian ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RAPBD Dinas Pertanian Kota Solok